PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421

e-mail : pa.negara@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Telp. 051751421 Fax. 051751421

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

e-mail : pa.negara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Negara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Selatan, 16 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

AHMAD ABDUL HAKAM
NIP 196510017198703100 2

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22
V. Catatan atas Laporan Keuangan 24
A. Penjelasan Umum 24
A.1. Dasar Hukum 24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara 25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 27
A.4. Basis Akuntansi 28
A.5. Dasar Pengukuran 28
A.6. Kebijakan Akuntansi 28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 36
B.2. Belanja 37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 41
C.1. Aset Lancar 41
C.2. Aset Tetap 43
C.3. Aset Lainnya 47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 49
C.6. Ekuitas 50

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 50
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 50
D.2. Beban Pegawai 51
D.3. Beban Persediaan 51
D.4. Beban Barang dan Jasa 52
D.5. Beban Pemeliharaan 53
D.6. Beban Perjalanan Dinas 53
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 54
D.8. Beban Bantuan Sosial 54
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 55
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 56
D.11. Beban Lain-lain 57
D.12. Kegiatan Non Operasional 57
D.13. Pos Luar Biasa 58
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 58
E.1. Ekuitas Awal 58
E.2. Surplus (defisit) LO 59
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 59
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan 59
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 59
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 60
E.3. 5 Koreksi Lain-lain 60
E.4. Transaksi Antar Entitas 60
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 61
E.4. 2Transfer Masuk/Transfer Keluar 61
E.3. Ekuitas Akhir 62
F. Pengungkapan Penting Lainnya 62
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 62
F.2. Pengungkapan Lain-lain 62

Daftar dan Lampiran 64
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 65
Daftar Hibah Langsung 67
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 69

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Negara

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56 Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421 e-mail : pa.negara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Selatan, 16 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretari

AHMAD ABDUL HAKAM
NIP 196510017198703100 2

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.646.928,- atau mencapai 66,67 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp2.470.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp4.074.797.112,- atau mencapai 99,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.075.904.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.340.097.258,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp2.241.700; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.337.855.558; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp13.406.640; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp13.406.640; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp3.326.690.618,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.648.928,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.080.969.224,-, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp3.079.322.296,-, Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(deficit) sebesar minus Rp0,-, dan surplus(defisit) sebesar minus Rp502.000,-, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar minus Rp3.078.820.296,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp1.923.959.543,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp3.078.820.296), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp408.401.187), dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.073.150.184, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp3.326.690.618,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 , Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2,470,000	1,646,928	66.68	13,658,240
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2,470,000	1,646,928	66.68	13,658,240
B.	Belanja Negara	B.2				
1	Belanja Pegawai	B.2.1	2,501,178,000	2,500,869,732	100	2,310,910,076
2	Belanja Barang	B.2.2	437,876,000	437,317,380	99.87	442,257,965
3	Belanja Modal	B.2.3	1,136,850,000	1,136,610,000	99.98	239,994,700
	Jumlah Belanja Negara		4,075,904,000	4,074,797,112	99.97	2,993,162,741

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	2.242.700	2,329,000
Jumlah Aset Lancar		2.241.700	2,329,000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.604.226.000	296.920.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1,655,021,636	1,616,021,636
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	1.448.243.000	1.537.171.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	74.717.500	74.717.500
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	30,514,348	30,514,348
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1,474,866,926)	(1,619,641,002)
Jumlah Aset Tetap		3.337.855.558	1,935,703,682
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	14.450.000	14.450.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	164.608.500	164.608.500
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(179.058.500)	(179,058,500)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		3.340.097.258	1,938,032,682
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	13.406.640	14,073,139

Uang Muka dari KPPN	**C.5. 2.**	**0**	**0**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**13.406.640**	**14,073,139**
Jumlah Kewajiban		**13.406.640**	**14,073,139**
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	**C.6**		
Jumlah Ekuitas Dana		**3.326.690.618**	**1,923,959,543**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**3.340.097.258**	**1,938,032,682**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1,646,928	13,658,240
Jumlah Pendapatan		13,658,240	13,658,240
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,499,964,732	2,711,389,583
Beban Persediaan	D. 3	56,905,630	18,927,198
Beban Barang dan Jasa	D. 4	200,665,730	178,808,693
Beban Pemeliharaan	D. 5	123,344,240	138,497,000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	57,229,720	53.500.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	142,859,172	144,522,654
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		3,080,969,224	2,901,093,828
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3,079,322,296)	(2,887,435,588)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Keg. Non Operasional lainnya		1,197,500	480,207

Beban dari Keg. Non Operasional lainnya		**695,500**	**83,187**
Jumlah surplus defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**502,000**	**397,020**
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Oerasional		**502,000**	**397,020**
Pos Luar Biasa	**D. 13**		
Beban Luar Biasa		**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas		**0**	**0**
Beban Persediaan		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(3,078,820,296)**	**(2,887,038,568)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2017
Ekuitas Awal	E. 1	1,923,969,543	1,833,031,345
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3,078,820296)	(2,887,038,568)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		408,401,187	(1,537,735)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	414,401,048	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	(6,000,000)	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	139	(1,537,735)
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4,073,150,184	2,979,504,501
Ekuitas Akhir		3,326,690,618	1,923,959,543

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Negara adalah : ”Terwujudnya Peradilan Agama Negara Yang Berwibawa, Bermartabat dan Akuntabel

2. Misi

Misi Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Proses Penerimaan Administrasi Perkara dan Penyelesaiannya;
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan;

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Negara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya percepatan proses penerimaan administrasi perkara dan penyelesaiannya sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan, dengan sasaran terdaftarnya perkara gugatan/ permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama, terwujudnya persidangan perkara secara sederhana pada tingkat pertama dan terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel) pada tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

2. Meningkatnya jumlah pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keiling dibiayai oleh negara pada pengadilan tingkat pertama.

3. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada pengadilan tingkat pertama serta terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada pengadilan tingkat pertama, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Hawasbid Tingkat pertama secara berkala, menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pelaksanaan Pembinaan

dan Pengawasan internal, pengawasan daerah secara berkala serta pengawasan insidentil serta menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan program peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau, peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dan peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan kepada Pengadilan Agama pengaju kemudian diserahkan kepada para pihak serta peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel. Dengan kegiatan menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama, menempelkan SK Panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan SK. Biaya proses pada pengadilan tingkat pertama di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara, SK Biaya Proses Berperkara dan pengelolaan biaya perkara di website, optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPA juga aplikasi SIIP terbaru, menerbitkan SK. Biaya Proses perkara pertama dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menayangkan hasil tindak lanjut kedalam website.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp13,658,240

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1,646,928,- atau mencapai 66,87 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2,470,000,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2018
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bagunan	2,470,000	1,646,928	67
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0.00
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
	Total Pendapatan	2,470,000	1,646,928	66.68

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp, atau sebesar persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1,646,928	13,658,240	(12,011,312)	(829)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
	Total Pendapatan	1,646,928	13,658,240	(12,011,312)	(829)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 2,993,162,741

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Negara per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 4,074,797,112,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,07% dari anggaran senilai Rp. 4,075,904,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,501,178,000	2,500,869,732	99,99
Belanja Barang	437,876,000	437,317,380	99,87
Belanja Modal	1,136,850,000	1,136,610,000	99,98
Total Belanja Bruto	4,075,904,000	4,074,797,112	99,97
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	4,075,904,000	4,074,797,112	99,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

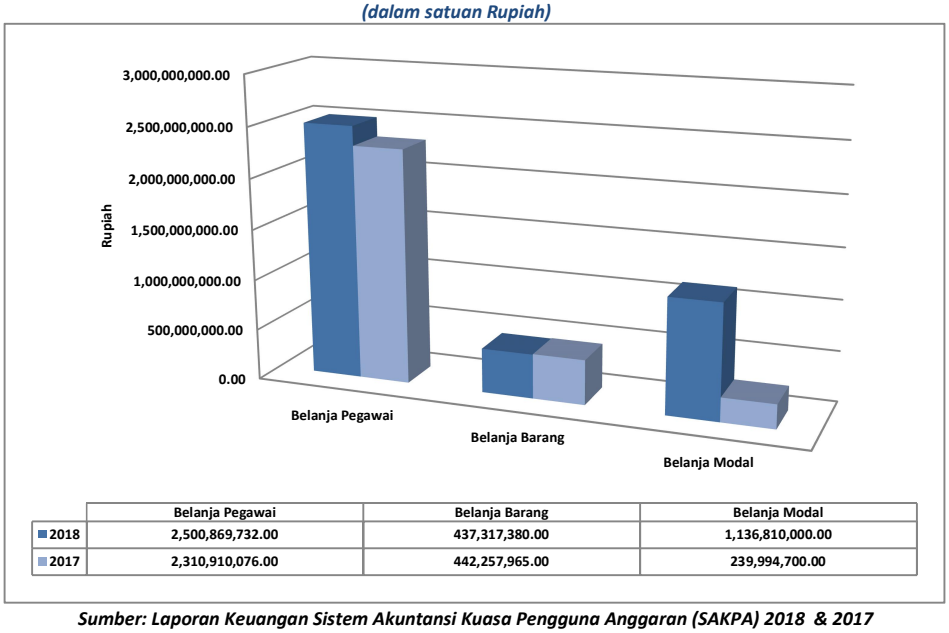

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2018	2,500,869,732.00	437,317,380.00	1,136,810,000.00
2017	2,310,910,076.00	442,257,965.00	239,994,700.00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. atau sebesar persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan karena realisasi Belanja Pegawai TA 2018 jauh mengalami kenaikan/penurunan karena beberapa pegawai termasuk hakim terkena Mutasi di tahun 2017.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2,310,910,076	2,713,859,000	(402,948,924)	(14,85)
Belanja Barang	442,257,965	389,001,693	53.256.272	13,69
Belanja Modal	239,994,700	224,997,000	14.997.700	6,67
Total Belanja	2,993,162,741	3,327,134,875	(333,972,134)	(10,04)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 2,993,162,741

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Negara per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.993.162.741 dan Rp. 3.327.134.875.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami penurunan sebesar 14,83 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain beberapa pegawai terutama hakim terkena Mutasi di tahun 2017.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	976,149,314	974.881.360	1.267.954	0,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	13,908	14.400	(492)	(3,42)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72,921,920	79.328.160	(6.406.240)	(8,08)
Beban Tunj. Anak PNS	20,770,022	21.717.640	(947.618)	(4,36)
Beban Tunj. Struktural PNS	26,130,000	25.690.000	(440.000)	(1,71)
Beban Tunj. Fungsional PNS	826,975,000	1.114.430.000	(287.455.000)	(25,79)
Beban Tunj. PPh PNS	87,438,892	162.237.472	(74.798.580)	(46,10)
Beban Tunj. Beras PNS	52,939,020	54.242.580	(1.303.560)	(2,40)
Beban Uang Makan PNS	155,877,000	138.586.000	17.291.000	12,48
Beban Tunjangan Umum PNS	3,945,000	4.615.000	(670.000)	(14,52)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	118.800.000	(31.050.000)	(26,14)
Beban Uang Lembur	0	18.593.600	18.593.600	(100)
Total Belanja Brutto	2,310,910,076	2,713,136,212	(402,226,136)	(14,83)
Pengembalian Belanja	0	(30)	(30)	(100)
Total Belanja Netto	2,310,910,076	2,713,136,182	(402,226,106)	(14,83)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp442,257,965

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Negara per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 442,257,965 dan Rp. 389,001,693.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,86 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain: antara lain bertambahnya keperluan terutama untuk belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan belanja perjalanan dinas pegawai di Pengadilan Agama Negara.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	223,153,919	167,758,113	55,395,806	33,02
Belanja Barang Non Operasional	4,400,000	11,500,000	(7.100.000)	(61,74)
Belanja Jasa	21,369,312	18,031,580	3,337,732	18,51
Belanja Pemeliharaan	128,335,934	138,212,000	(9,876,066)	(7,15)
Belanja Perjalanan Dinas	64,998,800	53.500.000	11,498,800	21,49
Total Belanja Brutto	442,257,965	389,001,693	53,256,272	13,69
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	442,257,965	389,001,693	53,256,272	13,69

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp239,994,700

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Negara per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 239,994,700 dan Rp. 224,997,000.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,67 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain bertambahnya keperluan penggantian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang rusak.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%
elanja Modal Peralatan & Mesin	239,994,700	224,997,000	14,997,700	6,67
otal Belanja Brutto	239,994,700	224,997,000	14,997,700	6,67
engembalian Belanja	0	0	0	0
otal Belanja Netto	239,994,700	224,997,000	14,997,700	6,67

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp 2,329,000

Nilai Aset Lancar per 30 September 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,329,000,- dan Rp. 7,165,020,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Negara per 30 September 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 September 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	0	6,829,120
Persediaan	2,329,000	335,900
Total Aset Lancar	2,329,000	7,165,020

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2017	TA 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

	Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 6,829,120. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2017	TA 2016
1	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	6,829,120
	Jumlah	0	6,829,120

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp2,329,000

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,329,000 dan Rp. 335,900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	2017	2016
1	Barang Konsumsi	2,329,000	325,900
2	Amunisi	0	10,000
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	2,329,000	335,900

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 1,935,703,682

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 1,935,703,682 dan Rp. 1,840,231,636. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	296.920.000	296.920.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1,616,021,636	1,376,026,936	239,994,700
3	Gedung dan Bangunan	1.537.171.200	1.537.171.200	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74.717.500	74.717.500	0
5	Aset Tetap Lainnya	30.514,348	30,514,348	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	3,555,344,684	3,315,349,984	239,994,700
	Akumulasi Penyusutan	(1,619,641,002)	(1,475,118,348)	(144,522,654)

Nilai Buku Aset Tetap	1,913,703,682	1,840,231,636	95,472,046

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp296.920.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 296.920.000 dan Rp. 296.920.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	369		Jl. Negara	Kantor	6.000.000
2	2	4,156		Kandangan	Kantor	290,920,000
Jumlah						296.920.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 1,616,021,636

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,616,021,636 dan Rp. 1,376,026,936.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	1,376,026,936
Mutasi Tambah	239,994,700
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	1,616,021,636
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(1,257,290,254)
Nilai Buku 31 Desember 2017	358,731,382

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 239,994,700,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 239,994,700,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 1.537.171.200

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.537.171.200 dan Rp. 1.537.171.200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	**1.537.171.200**
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	**1.537.171.200**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	**(287,633,248)**
Nilai Buku 31 Desember 2017	**1,249,537,952**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 74.717.500

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 74.717.500 dan Rp. 74.717.500.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	**74.717.500**
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	**74.717.500**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	**(74.717.500)**
Nilai Buku 30 September 2017	**0**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan

ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 30.514,348

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.514.348 dan Rp. 30.514.348.

Mutasi tambah aset tetap lainnya padaTahun 2017 keseluruhannya berasal dari Buku Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	**30,514,348**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2017	**30.514,348**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2017	**30.514,348**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (1.619,641,002)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(1,619,641,002) dan Rp(1,475,118,348).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.616,021,636	(1.257,290,254)	358,731,382
2	Gedung dan Bangunan	1.537.171.200	(287,633,248)	1,249,537,952
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74.717.500	(74.717.500)	0
4	Aset Tetap Lainnya	30,514,348	0	0
	Jumlah	3.258,241,284	(1,619,641,002)	1.935,703,682

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya: Rp 179,058,500,-

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 179,058,500 dan Rp. 179,058,500. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016
1	Aset tak Berwujud	14.450.000	14.450.000
2	Aset Lain-lain	164.608.500	164.608.500
	Nilai perolehan Aset Lainnya	179.058.500	179.058.500
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(179.058.500)	(179,058,500)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah

Rp 14.450.000

sebesar Rp. 14,450,000 dan Rp. 14,450,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software	14,450,000
	Jumlah Total	14,450,000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Negara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	14.450.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	14.450.000
Saldo per 31 Desember 2017	0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp 164.608.500

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 164.608.500 dan Rp. 164.608.500. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Negara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	164.608.500
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	164.608.500
Saldo per 31 Desember 2017	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp15,326,565

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 14,073,139 dan Rp. 14,365,311. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Negara per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Uang Muka Dari KPPN	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	14,073,139	14,365,311
Jumlah	14,073,139	14,365,311

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp14,073,139,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 14,073,139 dan Rp. 14,365,311. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Negara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus di Bayar	12.588.000	-
2	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Listrik)	1.414.979	-
3.	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Air)	45.000	-
4.	Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar (Rekening Telepon)	25.160	-
	Jumlah	14,073,139	-

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp 1,923,959,543,-

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,923,959,543,- dan Rp1,833,031,345. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 90.928.198 (4,96%) dari nilai per 31 Desember TA 2016.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp13,658,240,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp13.658.240,- dan Rp7,036,839. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70,000	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3,000,000	13.658.240	455,27
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	3,070,000	13.658.240	444,89

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2,316,025,885,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,316,025,885,-dan Rp2,712,871,583,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	961,729,054	971,544,001	10,185,053	1,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	13,807	14,490	(683)	(4,71)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	73,479,894	78,937,528	(5,457,634)	(6,91)
Beban Tunj. Anak PNS	20,944,218	21,576,912	(632,694)	(2,93)
Beban Tunj. Struktural PNS	26,130,000	25,690,000	440,000	1,71
Beban Tunj. Fungsional PNS	827,025,000	1,114,430,000	(287,405,000)	(25,78)
Beban Tunj. PPh PNS	87,438,892	162,237,472	(74,798,580)	(46,10)
Beban Tunj. Beras PNS	52,939,020	54,242,580	(1,303,560)	(2,40)
Beban Uang Makan PNS	154,631,000	142,190,000	12,441,000	8,74
Beban Tunjangan Umum PNS	3,945,000	4.615.000	(670,000)	(14,51)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	87,750,000	118,800,000	(31,050,000)	(26,13)
Beban Uang Lembur	0	18,593,600	(18.593.600)	(100)
Total Beban Pegawai	2,316,025,885	2,712,871,583	(18,593,600)	(218,00)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp32,355,850,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32,355,850,- dan Rp18,927,198. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	32,355,850	18,293,198	14,062,652	76,87
Beban Persediaan Amunisi	0	10,000	(10,000)	(100)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	0	624,000	(624,000)	(100)
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	32,355,850	18,927,198	13,428,652	70,95

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp216,137,705,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp216,137,705 dan Rp178,808,693,-. Beban Barang adalah konsumsi barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dan Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	133,089,000	106,808,113	26,280,887	24,60
Beban Jasa Pos dan Giro	2,495,969	3,000,000	(504,011)	(16,80)
Beban Honor Operasional Satker	39,600,000	29,700,000	9,900,000	33,33
Beban Barang Operasional Lainnya	15,300,000	9,750,000	5,550,000	56,92
Beban Bahan	1,400,000	2,000,000	(600,000)	(30,00)
Beban Barang Non Opr. Lainnya	3,000,000	9,500,000	(6,500,000)	(68,42)
Beban Langganan Listrik	20,082,000	13,836,636	7,617,993	55,05
Beban Langganan Telepon	496,313	3,614,944	(3,118,631)	(86,27)
Beban Langganan Air	555,200	599,000	(43,800)	(7,31)
Total Beban Barang dan Jasa	216,137,705	178,808,693	38,582,438	21,58

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp131,452,934,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp131,452,934,- dan Rp138,497,000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung	44,150,000	70,600,000	(26,450,000)	(37,46)
dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	24,150,000	4,200,000	19,950,000	475,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,035,934	50,412,000	9,623,934	19,09
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	13,000,000	(13,000,000)	(100)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,117,000	285,000	2,832,000	993,68
Total Beban Pemeliharaan	131,452,934	138,497,000	(7,044,066)	(5,09)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp60,598,800,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp60,598,800 dan Rp53.500.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 20156	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	60,598,800	53.500.000	7,098,800	13,27
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	60,598,800	53.500.000	7,098,800	13,27

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan

2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp144,522,654,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp144,522,654,- dan Rp148,431,664,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111,554,318	116,243,284	(4,688,966)	(4,03)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32,968,336	32,188,380	779,956	2,42
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	144,522,654	148,431,664	(3,909,010)	(2,63)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	144,522,654	148,431,664	(3,909,010)	(2,63)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp397,020,-

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
KEGIATAN NON 0PERASIONAL				
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	480,207	308,500	171,707	(55,65)
Beban dari Kegiatan Non Oerasional Lainnya	83,187	(471,902)	(388,715)	(82,37)
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	397,020	(163)	560,422	26,71
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	397,020	(163)	560,422	26,71

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,833,031,345,- dan Rp1,743,708,396,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(2,887,038,68) dan Rp(3,244,162,701). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12,885,614,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp0 dan koreksi nilai aset lainya non revaluasi Rp(0) .

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp1,537,735) dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	1,537,735
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	1,537,735

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,979,504,501,- dan Rp3,320,600,036,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(13,658,240)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,993,162,741
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2,979,504,501

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 31 Desember 2017 , DDEL sebesar Rp13,658,240 sedangkan DKEL sebesar (2,993,162,741,-).

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 , sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2017 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 , adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	0
2	-	-	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,923,959,543,- dan Rp1,833,031,345,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada Temuan dan Tidak lanjut Temuan BPK untuk periode Tahun Anggaran ini dan Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk priode ini(terlampir)

F.2.3. Rekening Pemerintah

A.n. BPG 110 PA (01) NEGARA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-.

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA sekali yaitu revisi ke 1 pagu minus belanja pegawai yang dilakukakan eselon I tertanggal 10-01-2018.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat Ralat SPM 4 buah untuk periode ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara Nomor: Nomor : W15-A11/003/KU.03/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara W15-A11/001/KU.03/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara maka pada tanggal 02 Januari 2017 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: H. HALIDIN, SH
PejabatPenandatangan/Penguji SPM	: MUHAMMAD YUSRAN, SH
Bendahara Pengeluaran	: HUSAINI, S.H.I
Menjadi :	
Pejabat Pembuat Komitmen	: H. HALIDIN, SH
PejabatPenandatangan/Penguji SPM	: MUHAMMAD YUSRAN, SH
Bendahara Pengeluaran	: HUSAINI, S.H.I

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, AMORTISASI DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Negara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
A.	Peralatan dan Mesin	275	1,376,026,936	1,151,076,886	111,554,318	1,262,631,204	358,731,382
1.	Alat bantu	1	85,049,720	12,149,960	12,149,960	24,299,920	60,749,800
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	232,887,446	221,515,972	11,371,494	232,887,466	0
3.	Alat Kantor	53	116,776,000	116,871,000	0	116,871,000	0
4.	Alat Rumah Tangga	194	467,566,020	393,501,778	17,111,892	410,613,670	56,952,350
5.	Alat Studio	8	16,211,000	8,211,000	2,000,000	10,211,000	6,000,000
6.	Alat Komunikasi	12	16,243,000	16,243,000	0	16,243,000	0
7.	Peralatan Pemancar	3	148,994,700	11,600,000	14,899,470	26,499,470	122,495,230
8.	Komputer Unit	43	441,976,520	327,485,016	35,995,752	363,480,768	78,495,752
9.	Peralatan Komputer	24	95,563,160	43,499,160	18,025,750	61,524,910	34,088,250
B.	Gedung dan Bangunan	8	1,537,171,200	254,664,912	32,968,336	287,633,248	1,249,537,952
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7	1,376,171,200	224,074,912	29,748,336	253,823,248	1,122,347,952
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	161,000,000	30,590,000	3,220,000	33,810,000	127,190,000
C.	Jaringan	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
1.	Instalasi Lain	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
D.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	123	166,647,500	166,647,500	0	166,647,500	0
1.	Alat Kantor	59	2,076,250	2,076,250	0	2,076,250	0
2.	Alat Rumah Tangga	42	20,401,250	18,922,250	0	20,401,250	0
3.	Alat Studio	3	206,000	206,000	0	206,000	0
4.	Alat Komunikasi	2	3,059,000	3,059,000	0	3,056,000	0
5.	Komputer Unit	12	134,015,000	134,015,000	0	134,015,000	0
6.	Peralatan Komputer	5	6,890,000	6,890,000	0	6,890,000	0
		TOTAL	3,414,348,785	1,661,556,798	144,522,654	1,806,079,452	1,608,269,334

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Negara

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah :	-	-	-	-

B. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

PENGADILAN AGAMA NEGARA
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

BA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
Eselon 1	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
UAPPA W	**: 1500**	**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**
Satuan Kerj	**: 402571**	**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	511124	Tunj. Fungsional Pegawai	826,975,000	50,000	-	827,025,000	Daftar Kek. Gaji
2	511129	Uang Makan Pegawai	155,877,000	12,538,000	-	168,415,000	Daftar U. Makan
3	522111	Langganan Listrik	20,082,000	1,414,979	-	21,496,979	Rekening Listrik
4	522112	Langganan Telepon	713,112	45,000	-	758,112	Rekening Telepon
5	522113	Langganan Air	574,200	25,160	-	599,360	Rekening Air
		Jumlah	**1,004,221,312**	**14,073,139**		**1,018,294,451**	

Kuasa Pengguna Anggaran

H. HALIDIN, SH
NIP.196010021981031004

DRAFT